



**PEMERINTAH KOTA MATARAM**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP)**

**TAHUN 2021**



## WALIKOTA MATARAM

### SAMBUTAN



Penyelenggaraan proses pemerintahan dan akuntabilitas sejatinya merupakan dua hal yang tidak dapat diposisikan terpisah. Akuntabilitas merupakan keharusan dari Pemerintah dalam wujud representasinya sebagai organisasi public yang bekerja atas kepentingan public dengan mengelola sumber daya yang tentunya diorientasikan pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Mataram dalam menjalankan perannya sebagai inti dari Nusa Tenggara Barat selalu berusaha mengedepankan aspek akuntabilitas sebagai wujud nyata pelaksanaan tanggungjawab atas kepercayaan rakyat dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan bersama. Atas dasar tersebut, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk kemudian menjadi sarana dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP.

Tahun 2021 merupakan tahun yang memiliki banyak riwayat dan hikayat penting dalam proses merawat eksistensi Kota Mataram yang diantaranya meliputi serah terima estafet



kepemimpinan Walikota Mataram dan tentunya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mendengah Daerah periode 2021-2026. Kondisi ini berimplikasi pada harmonisasi program yang telah direncanakan pada RPJMD 2015 – 2021 dengan orientasi mewujudkan Mataram Maju, Religius dan Berbudaya dan program pada 2021-2026 untuk mewujudkan Mataram yang Harmoni, Aman, Rukun, Unggul dan Mandiri. Masa transisi ini memberikan dampak langsung pada pengukuran kinerja yang perlu memperhatikan irisan dan gabungan antara dua prioritas utama daerah. Meskipun demikian, Kota Mataram tetap mampu mempertahankan kualitas kinerja yang diukur dengan pendekatan-pendekatan praktikal dan penuh pertimbangan cermat. Tentunya hal ini memiliki dampak yang baik yang ditunjukkan terdapat 18 Indikator Kinerja dari 23 total indicator kinerja yang berkategori **Sangat Tinggi** atau dengan estimasi pencapaian 100% dan bahkan lebih serta 3 Indikator Kinerja dengan kriteria **Tinggi**. Terdapat juga tiga indicator yang menunjukkan kualitas sangat baik yakni peningkatan pada Angka Harapan Lama Sekolah, Pengaturan Inflasi pasca pandemic dan peningkatan pertumbuhan ekonomi unggulan.

Kondisi ini merupakan hasil dari komitmen kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Daerah di Kota Mataram. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Mataram masih tetap harus mengkonservasi jiwa antusias dan animo pembangunan yang bersifat infrastruktur, intelektual dan juga ekologis. Terlebih dikarenakan juga oleh penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis menuntut kinerja yang progresif dan adaptif sehingga Kota Mataram masih memerlukan dukungan dan kerja keras yang panjang untuk mewujudkan Kota Mataram yang Harmoni, Aman, Ramah, Unggul dan Mandiri.

Mataram, Maret 2022

WALIKOTA MATARAM,  
  
H. MOHAM ROLISKANA, S.Sos., MH.



## DAFTAR ISI

	hal
<b>SAMBUTAN WALIKOTA MATARAM</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>4</b>
A. LATAR BELAKANG .....	4
B. GAMBARAN UMUM KOTA MATARAM .....	5
C. STRUKTUR DAN TATA KERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM .....	7
D. ISU STRATEGIS .....	9
<b>BAB II AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH</b> .....	<b>15</b>
A. PENETAPAN SASARAN STRATEGIS .....	15
B. TARGET KINERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 .....	20
C. PROGRES DAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 .....	22
D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	27
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>40</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas sangat memiliki peran yang krusial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang secara signifikan memberi dampak pada optimalisasi tata Kelola pemerintahan dan membangun kepercayaan terhadap proses pemerintahan yang dijalankan.

Dalam mewujudkan birokrasi pemerintah yang berkinerja baik dan akuntabel, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ini merupakan rujukan atas system akuntabilitas yang harus dilaksanakan pada setiap instansi pemerintah dengan memberi penekanan dalam aspek pelaporan. Lebih lanjut, untuk menguatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan pemerintah daerah, maka perlu dilaksanakan proses evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah Kota Mataram penetapan indikator kinerja dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang berfokus pada capaian indikator kinerja sasaran strategis dan indikator tujuan daerah menjadi parameter penting dalam merepresentasikan kinerja pemerintah Kota Mataram.

## B. GAMBARAN UMUM KOTA MATARAM

Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat terbentuk pada 31 Agustus 1993 dengan didasari oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2007 tentang Kode Wilayah dan Administrasi Pemerintahan pada lampirannya menyebutkan luas wilayah Kota Mataram adalah 6.130 (enam ribu seratus tiga puluh) hektar atau 0,30% dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan luas wilayah perkecamatan, Kecamatan Selaparang merupakan kecamatan terluas di Kota Mataram yaitu dengan luas 1.077 Ha atau 17,57% sementara Kecamatan Ampenan merupakan kecamatan terkecil di Kota Mataram yaitu dengan 946,00 Ha atau 15,43%.

Tabel 1  
Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan  
di Kota Mataram

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
Cakranegara	10	73	9,67	15,77
Sandubaya	7	45	10,32	16,84
Mataram	9	55	10,76	17,55
Selaparang	9	61	10,77	17,57
Ampenan	10	55	9,46	15,43
Sekarbela	5	36	10,32	16,84
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>325</b>	<b>61,30</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kota Mataram, 2021

Secara administrasi Kota Mataram terbagi dalam 6 wilayah Kecamatan, 50 Kelurahan dan 325 lingkungan dan berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram jumlah penduduk Kota Mataram pada tahun 2021 mencapai

440.351 jiwa, dengan jumlah penduduk laki – laki sebanyak 219.293 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 221.058 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Kota Mataram secara keseluruhan mencapai 7.184 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tabel 2  
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Mataram

NO	NAMA KECAMATAN	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk jiwa/Km <sup>2</sup>
		L (JIWA)	P (JIWA)	JMLH (JIWA)		
1	AMPENAN	44.946	45.411	90.357	9.46	9.551
2	MATARAM	39.554	40.173	79.727	10.76	7.410
3	AKRANEGARA	35.352	35.345	70.697	9.67	7.311
4	SEKARBELA	29.349	29.288	58.637	10.32	5.682
5	SELAPARANG	35.888	36.890	72.778	10.77	6.757
6	SANDUBAYA	34.204	33.951	68.155	10.32	6.604
JUMLAH		219.293	221.058	440.351	61.30	7.184

Sumber : BPS Kota Mataram, 2021

Secara geografis, Kota Mataram terletak pada ujung sebelah barat Pulau Lombok dan secara astronomis terletak pada posisi 116°04' dan 116°10' Bujur Timur dan 08°33' - 08°38' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Barat : Selat Lombok.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) serta bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Pulau Lombok. Dengan penetapan tersebut, peran dan fungsi Kota Mataram mengalami peningkatan. Tidak hanya sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram juga berfungsi dan berperan sebagai :

1. Pusat Pemerintahan Provinsi NTB sekaligus pusat Pemerintahan Kota Mataram;
2. Simpul koleksi distribusi barang dan jasa regional, serta penduduk di Provinsi NTB;
3. Pusat pengolahan hasil-hasil pertanian dan kelautan;
4. Pusat kegiatan pelayanan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
5. Daya tarik terhadap kota-kota daerah sekitar (*hinterland*) secara khusus dan kota-kota kabupaten di Provinsi NTB pada umumnya; dan
6. Salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi NTB.

Selain itu, di dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi NTB, wilayah Kota Mataram dibagi menjadi 3 (tiga) Pusat Pelayanan Kota (PPK), yaitu pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat pada Kawasan Koridor AMC. Ketiga PPK tersebut meliputi :

1. Pusat Pelayanan Ampenan ditetapkan di Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah dan Kelurahan Banjar dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pendukung pariwisata;
2. Pusat Pelayanan Mataram ditetapkan di Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Gomong, Kelurahan Punia dan Mataram Timur dengan fungsi sebagai pusat perkantoran dan pelayanan umum;

Penetapan PPK ini bertujuan untuk melayani kegiatan eksternal wilayah secara regional dan nasional.

### C. STRUKTUR DAN TATA KERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM

Kota Mataram sebagai wilayah otonomi daerah menyelenggarakan pemerintahan memiliki 4.958 orang Pegawai Negeri Sipil dengan di dominasi oleh PNS bergolongan III/d sebanyak 889 orang. Berdasarkan struktur organisasi pemerintahan dengan berdasar pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mataram, maka telah dibentuk 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan uraian sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah

- b. Sekretariat DPRD Kota Mataram
- c. Inspektorat Kota Mataram
- d. Dinas daerah terdiri dari :
  - 1) Dinas Kesehatan
  - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 3) Dinas Perhubungan
  - 4) Dinas Komunikasi dan Informatika
  - 5) Dinas Pendidikan
  - 6) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
  - 7) Dinas Sosial
  - 8) Dinas Tenaga Kerja
  - 9) Dinas Pariwisata
  - 10) Dinas Pertanian
  - 11) Dinas Perikanan
  - 12) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
  - 13) Dinas Perdagangan
  - 14) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  - 15) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana
  - 16) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 17) Dinas Lingkungan Hidup
  - 18) Dinas Ketahanan Pangan
  - 19) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - 20) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
  - 21) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - 22) Dinas Pemadam Kebakaran
  - 23) Satuan Polisi Pamong Praja
- e. Badan daerah terdiri dari :
  - 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
  - 2) Badan Penelitian dan Pengembangan
  - 3) Badan Keuangan Daerah]
  - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
  - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 7) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram
- f. Kecamatan terdiri dari :
- 1) Kecamatan Ampenan
  - 2) Kecamatan Sekarbela
  - 3) Kecamatan Mataram
  - 4) Kecamatan Selaparang
  - 5) Kecamatan Cakranegara
  - 6) Kecamatan Sandubaya

Tabel 3  
Jumlah Perangkat Daerah

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	1
2	Sekretariat DPRD	1
3	Inspektorat	1
4	Dinas Daerah	23
5	Badan Daerah	7
6	Kecamatan	6
Total		39

#### D. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Analisa dilakukan berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah, yang harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu

jangka menengah atau jangka panjang. Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan Kota Mataram adalah sebagai berikut :

1. Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan di Kota Mataram;
2. Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara simultan hasilnya saling memengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan Kota Mataram lainnya;
3. Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian target-target pembangunan Kota Mataram di berbagai bidang;
4. Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Kota Mataram;
5. Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian bidang pembangunan lainnya di Kota Mataram; dan
6. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Kota Mataram yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan dan implementasi.

Permasalahan pembangunan daerah atau analisis isu strategis internal merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun ke depan. Bagian ini menyajikan hal-hal penting tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis internal Kota Mataram. Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Kota Mataram sebagaimana telah disajikan pada Bab 2, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan Kota Mataram dijabarkan secara sistematis dalam 5 (lima) kelompok permasalahan yakni bidang pengembangan sumber daya manusia, bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, bidang perekonomian, bidang keamanan dan bidang tata kelola pemerintahan.

## **FOKUS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Perencanaan pembangunan manusia penting untuk dapat meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2016-2020), IPM Kota Mataram menunjukkan peningkatan kecuali di tahun 2020 menurun sebesar 0,19 poin dibanding tahun sebelumnya (lihat Gambar 2.8). Meskipun demikian, capaian IPM dalam lima tahun terakhir termasuk dalam kategori tinggi, meski pertumbuhannya cenderung lambat (lihat Grafik 2.8). Capaian pembangunan ini tentu saja telah menghantarkan masyarakat Kota Mataram ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Namun demikian, tingginya pencapaian pembangunan manusia tidaklah cukup. Salah satu tujuan pembangunan manusia adalah untuk memperluas pilihan bagi seluruh penduduk. Untuk mewujudkannya, pemerintah berkewajiban untuk menjamin masyarakat agar memperoleh kesempatan yang adil.

## **FOKUS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Permasalahan makro yang dihadapi oleh Kota Mataram dalam lima tahun terakhir ditilik dari fokus pengembangan infrastruktur dan lingkungan hidup adalah belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2020 masih dalam kategori sedang yaitu dengan nilai sebesar 57,05 persen. Rendahnya nilai IKLH Kota Mataram disebabkan oleh masih tingginya tingkat pencemaran air permukaan dan masih rendahnya luasan tutupan lahan di Kota Mataram. Terkait kualitas udara di Kota Mataram secara umum sudah memenuhi standar, namun masih terdapat ancaman pencemaran di beberapa lokasi terutama di kawasan perdagangan dan jasa akibat tingginya mobilitas kendaraan. Di samping itu, permasalahan kualitas lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh pengelolaan persampahan yang belum optimal, dimana masih terdapat sekitar 8 persen volume sampah kota yang belum terkelola. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pembangunan infrastruktur perkotaan yang meliputi infrastruktur ke-PU-an, infrastruktur perhubungan, dan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang ditandai dengan masih rendahnya capaian Indeks Infrastruktur Wilayah pada tahun 2020 sebesar 59,24.

## FOKUS PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH

Permasalahan makro yang dihadapi oleh Kota Mataram dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah relatif kurangnya daya saing ekonomi dibandingkan wilayah sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang jauh lebih fluktuatif dibandingkan provinsi, apalagi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Fundamental ekonomi Kota Mataram juga terlihat rapuh (unrobust) ketika terjadi pandemi COVID-19. Hal ini tercermin dari kinerja ekonomi Kota Mataram mengalami kontraksi cukup tajam yaitu sebesar minus 5.50 persen pada tahun 2020 sebagai dampak dari penurunan produksi di seluruh kategori lapangan usaha, sementara kinerja ekonomi Provinsi NTB dan Nasional masih lebih baik meskipun juga sama-sama mengalami kontraksi dengan capaian pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar minus 0.64 persen dan minus 0.40 persen. Rapuhnya fundamental ekonomi Kota Mataram dikarenakan struktur pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didominasi oleh sektor/kategori usaha tersier seperti kategori usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta kategori usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami distorsi sebagai dampak pembatasan mobilitas aktivitas masyarakat, barang dan jasa serta pembatasan operasional pusat-pusat perdagangan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Hal ini berbeda dengan perekonomian dengan basis *engine of growth* pada sektor primer (sektor pertanian dan pertambangan) seperti nasional dan Provinsi NTB tidak terlalu terdampak sebagai akibat pandemi COVID-19.

Data lain yang juga menunjukkan relatif rendahnya daya saing Kota Mataram adalah relatif tingginya Indeks Gini Kota Mataram yaitu sebesar 0,381 pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan Provinsi NTB yang capaiannya sedikit lebih baik yaitu sebesar 0,376. Relatif tingginya Gini Rasio Kota Mataram merupakan dampak dari melambatnya kinerja sektor ekonomi unggulan Kota Mataram yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja menjadi berkurang. Indikasi lain dari relatif rendahnya daya saing Kota Mataram adalah sangat rendahnya angka inflasi kota Mataram (0,58 persen) dibandingkan dengan Provinsi NTB (0,60 persen) dan Nasional (1.68 persen). Rendahnya angka inflasi Kota Mataram merupakan cerminan dari lemahnya daya beli masyarakat. Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua

permasalahan ekonomi daerah yang harus menjadi fokus dalam pembangunan Kota Mataram ke depan di antaranya: 1) Sebagai wilayah kota yang menjadi pintu gerbang masuk dan keluar wilayah NTB, perekonomian Kota Mataram bertumpu pada kategori usaha tersier yakni kategori usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta kategori Usaha Industri Pengolahan. Pada aspek ini, terlihat bahwa kinerja yang dicapai belum maksimal. Pertumbuhan kategori usaha dimaksud cukup tinggi, namun daya tahannya juga masih relatif rendah terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19, yang merupakan kinerja terendah dalam lima tahun terakhir (2016-2020). Hal ini terlihat dari pertumbuhannya yang mengalami kontraksi sebesar minus 8,19 persen. 2) Pada sisi lain, sektor industri kreatif yang berketerkaitan dengan Urusan Perindustrian, Koperasi/UMKM, Pariwisata, Pertanian serta Perikanan yang memiliki potensi besar, namun belum berkembang secara baik. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kontribusi maupun pertumbuhan kategori usaha Industri Pengolahan, kategori usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta kategori usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

### **FOKUS KONDUSIFITAS WILAYAH**

Kondusifitas wilayah erat dengan kebutuhan masyarakat atas rasa aman. Kondusifitas wilayah Kota Mataram digambarkan dengan Indeks Keamanan Manusia yang mana Kota Mataram berada pada nilai 3,7 dari skala maksimal 5. Artinya, kondusifitas wilayah Kota Mataram belum optimal. Hal ini dapat diuraikan menjadi dua faktor utama kondisi yang merujuk pada gambaran kondusifitas daerah yaitu derajat gangguan kamtibmas dan mengenai potensi dan ketahanan bencana.

### **FOKUS TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Tata kelola pemerintah yang berkualitas berupaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Permasalahan makro tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh Kota Mataram dalam lima tahun terakhir adalah capaian nilai Reformasi Birokrasi yang kurang optimal. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business

process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi ini merupakan salah satu upaya komprehensif untuk menangkap berbagai perkembangan perubahan lingkungan strategis untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2019 dan 2020 oleh KemenPAN-RB, Capaian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mataram berturut-turut adalah 62,27 dan 64,00 atau masih dalam kategori “B” dari skala maksimal Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 100. Sedangkan target yang ingin dicapai pada tahun tersebut adalah mendapatkan predikat BB atau dengan nilai minimal 70, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja tata kelola pemerintahan Kota Mataram belum optimal dalam mencapai target yang diinginkan.

## BAB II

# AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

### A. PENETAPAN SASARAN STRATEGIS

Target kinerja pemerintah yang merupakan aspek derivative dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram (RPJMD) yang disusun dengan menjabarkan misi dan tujuan ke dalam uraian-uraian aktivitas yang terukur.

Tahun 2021 merupakan masa transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan penggantinya, yakni RPJMD Tahun 2021-2026. Untuk membentuk suatu pembangunan yang sinergi dan berkelanjutan serta dapat dipantau progress keberhasilannya secara intensif, tentunya sasaran strategis pemerintah pada tahun 2021 mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026.

Adapun sasaran-sasaran strategis pada RPJMD tahun 2021-2026 yang berisikan visi Terwujudnya Mataram yang HARUM: Harmoni, Aman, Ramah, Unggul dan Mandiri tersebut tidak memperbarui RPJMD sebelumnya, hanya ada beberapa sasaran strategis mengalami penyesuaian untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih adaptif, *agile*, dan progresif.

Berangkat dari visi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 tersebut maka terjabarkan 5 misi dan 6 tujuan yang disusun dengan kerangka pikir logis. Adapun penjabaran misi dan tujuan yang menjadi dasar penetapan indikator keberhasilan serta target kinerja pemerintah 2021 adalah sebagai berikut:

#### **MISI 1 MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER**

Untuk mencapai cita-cita kota yang UNGGUL, Kota Mataram mengupayakan perwujudan peningkatan kualitas dan karakter sumber daya manusia (SDM) menuju masyarakat yang sejahtera. Peningkatan kualitas SDM utamanya diupayakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas pendidikan di pendidikan karakter yang baik diharapkan tergambarkan dari pemenuhan fasilitas dan pemerataan akses kualitas pendidikan yang berdampak pada derajat pendidikan masyarakat yang tinggi tanpa meninggalkan budaya dan karakter bangsa. Sementara derajat kesehatan masyarakat diharapkan tergambarkan dengan angka harapan hidup masyarakat Kota Mataram yang tinggi. Selain itu, masyarakat Kota Mataram juga diharapkan dapat mencapai kesejahteraan

sosial yang memadai yang ditandai dengan mengurangi kemiskinan dengan menjaga kebutuhan dasar minimal masyarakat, meningkatkan keberdayaan masyarakat secara inklusif tanpa bias usia, gender dan status sosial, serta memberi perlindungan bagi anak-anak penerus bangsa sekaligus menyediakan ruang kepada anak-anak berprestasi untuk meningkatkan kemampuan di segala bidang. Pelaksanaan misi ini berorientasi penuh pada optimalisasi fungsi layanan-layanan dasar yang dimiliki Pemerintah Kota Mataram dalam pengembangan kualitas dan karakter penduduk Kota Mataram. Misi ini merupakan bentuk kongkret dari komitmen Pemerintah Kota Mataram dalam mendukung kemajuan masyarakat dan menjaga kelestarian dari karakter masyarakat di Kota Mataram yang heterogen secara peradatan dan kebudayaan. Misi ini menggunakan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolak ukur. Untuk itu, misi ini menitikberatkan pada beberapa aspek yang kemudian diterjemahkan menjadi tujuan pembangunan yakni kualitas Pendidikan, Kesehatan dan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada tiga aspek ini maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada misi 1 sebagai berikut:

**Tabel 2.5**

**Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat	Tercapainya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas
	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak

**MISI 2 MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN**

Misi ke dua dari Visi Mataram HARUM ini menjadi bentuk nyata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengedepankan konsep *triple bottom line* untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap mengedepankan aspek lingkungan hidup atau *Environment*. Misi ini juga merupakan bukti kesadaran dan dukungan atas penyelesaian tantangan global yang saat ini dihadapi oleh seluruh

negara di dunia, yakni menjembatani kebutuhan manusia dan alam. Pada misi ini tertuang komitmen Pemerintah Kota Mataram untuk tidak hanya melestarikan lingkungan dan ekosistem didalamnya tapi juga untuk membangun infrastruktur yang mampu menjadi sarana harmonisasi antara kebutuhan hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Misi ini kemudian diterjemahkan menjadi dua tujuan pembangunan sesuai dengan objek dari misi ini yakni lingkungan hidup dan infrastrukturnya. Berikut merupakan penjabaran detail atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada misi dua :

**Tabel 2.6**

**Tujuan dan Sasaran Misi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Perkotaan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Terciptanya Infrastruktur Perkotaan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

**MISI 3 MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING**

Kota Mataram dengan statusnya sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara geografis memiliki potensi sebagai pusat pergerakan ekonomi di NTB. Misi ke tiga ini merupakan bentuk ikhtiar untuk mengoptimalkan potensi Kota Mataram sehingga memiliki keuntungan ekonomis yang bermanfaat bagi kemajuan daerah.

Kondisi ekonomi Kota Mataram saat ini memiliki banyak sekali potensi pendukung mulai dari kebijakan pemerintah pusat menetapkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di NTB, perkembangan teknologi pada UMKM hingga peningkatan daya beli masyarakat. Untuk itu, eksekusi potensi tersebut menjadi aspek krusial untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan memajukan industry kreatif.

Merujuk pada pertimbangan tersebut maka tujuan dan sasaran dari misi ketiga dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Tabel 2.7

## Tujuan dan Sasaran Misi Meningkatkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Pengembangan Industri Kreatif	Terwujudnya peningkatan kinerja pada sektor ekonomi unggulan
	Terwujudnya peningkatan kinerja pada sektor ekonomi kreatif

**MISI 4 MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH**

Kondisi sosial kemasyarakatan yang heterogen dan pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram yang menjadi daya tarik tersendiri dirasa sangat perlu untuk tetap mampu menjaga kualitas keamanan yang ada di wilayah sekitar. Kota Mataram bercita-cita menjadi kota yang AMAN dan menyediakan kehidupan yang HARMONI bagi masyarakatnya. Dengan status ibukota provinsi dengan karakter pluralisme yang tinggi, Kota Mataram bertujuan untuk memberi rasa aman dan nyaman dengan mengayomi semua masyarakat. Menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah dari gangguan penyakit masyarakat. Menjaga demokrasi dan memberi ruang bagi keragaman yang ada baik suku, agama, ras, dan golongan yang ada di masyarakat. Menjamin kebebasan menjalankan ibadah beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing warga. Selain menjadi tolak ukur keberhasilan pada aspek *law enforcement*, keamanan wilayah juga menjadi gambaran kesigapan Pemerintah Kota Mataram dalam menindaklanjuti segala hal-hal tidak terduga baik dari aspek kebencanaan dan gangguan sosial. Dengan demikian, misi ke empat ini hadir dengan tujuan untuk mengendalikan kondusifitas hidup masyarakat di wilayah Kota Mataram dalam perspektif aman yang meliputi aman secara ekonomi, aman secara hukum, aman secara sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Adapun tujuan dan sasaran misi ke empat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

## Tujuan dan Sasaran Misi Meningkatkan Keamanan Wilayah

Tujuan	Sasaran
Mengendalikan Kondusifitas Wilayah	Tercapainya peningkatan indeks Keamanan Manusia

**MISI 5 MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK**

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan suatu konsep penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Salah satu indicator tata kelola pemerintahan yang baik yakni pengelolaan negara didasari kepada keterlibatan stakeholders dimana pemerintah dan masyarakat membicarakan masalah yang dihadapi sekaligus merencanakan apa yang akan dilakukan.

Untuk mewujudkan konsep tersebut, pemerintah Kota Mataram berkomitmen dalam misi ke 5 untuk meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintah dan partisipasi public dengan tujuan yang tak hanya menciptakan pemerintahan yang baik, namun juga tata Kelola yang efektif dan inovatif serta mengayomi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mewujudkan misi ke lima ini secara sistematis, maka disusun tujuan dan sasaran kongkret sebagaimana tabel dibawah :

**Tabel 2.9**
**Tujuan dan Sasaran Misi Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Partisipasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan**

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan inovatif	Tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel di kota Mataram
	Tercapainya peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik

**B. TARGET KINERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2021**

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran yang telah disusun dalam RPJMD 2021-2026 setiap tujuan dan sasaran disertai oleh indikator-indikator kuantitatif yang menjadi parameter perkembangan kinerja Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan Kota Mataram yang HARUM: Harmoni, Aman, Ramah, Unggul dan Mandiri.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta indikator keberhasilannya dan targetnya Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.10**
**Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Target Kinerja Tahun 2021**

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	TARGET 2021
<b>MISI I : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER</b>				
I.1 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	Nilai	78,91	79,29
I.1.1 Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Meningkat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,46	9,51
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,28	15,36
I.1.2 Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,43	71,76
	Prevalensi Stunting	persen	20,7	18,81
I.1.3. Keberdayaan dan Kesejahteraan	Angka Kemiskinan	persen	8,47	9,00

				TARGET
Masyarakat Meningkat	Indeks Pembangunan Gender	nilai	92,77	92,80
	Indeks Pembangunan Kepemudaan	nilai	64,46	64,75
<b>MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN</b>				
II.1 MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	persen	57,05	57,21
II.1.1 Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	57,05	57,21
II.2 MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	INDEKS INFRASTRUKTUR WILAYAH	persen	59,24	60,24
II.1.2 Kualitas Infrastruktur Perkotaan Meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	persen	59,24	60,24
<b>MISI III : MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING</b>				
III.1 MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	persen	-5,5	-0,95
	GINI RATIO	Nilai	0,381	0,374
	INFLASI	persen	0,58	3 ± 1
III.1.1 Kinerja Sektor Ekonomi Unggulan Meningkat	Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	persen	-4,85	-0,60
III.1.2. Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif Meningkat	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi kreatif	persen	9,85	9,90
<b>MISI IV : MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH</b>				
IV.1 MENGENDALIKAN KONDUSIFITAS WILAYAH	INDEKS KEAMANAN MANUSIA	Nilai	3,70	3,70
IV.1.1 Stabilitas Wilayah Terkendali	Indeks Keamanan Manusia	Nilai	3,70	3,70
<b>MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK</b>				

				TARGET
V.1 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN INOVATIF	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Nilai	64,00	64,50
V.1.1 Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kota Mataram Meningkatkan	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	65,76	66,00
	Indeks SPBE	Nilai	n/a	3,56
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	predikat	n/a	B
	Opini BPK	predikat	WTP	WTP
IV.1.2 Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan	Indeks Kepuasan Pelayanan	persen	n/a	n/a
	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	1.944*	60

### C. PROGRES DAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2021

Akuntabilitas merupakan poin yang selalu menjadi prioritas pada pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas sejatinya menggarisbawahi dua dimensi penting yakni pengukuran dan pertanggungjawaban. Dengan demikian setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat dinyatakan akuntabel, ketika aktivitas tersebut mampu dikuantifikasi progresnya sebagai dasar pertanggungjawaban. Penerapan asas akuntabilitas sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui tingkat performa penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada pengukuran performa kinerja pemerintah daerah, adapun kriteria penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja mengacu pada Lampiran E.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Terdapat dua rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator, yaitu :

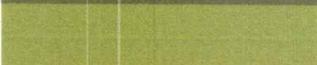
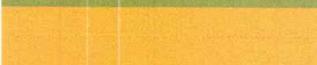
1. Indikator bermakna target peningkatan, artinya: jika semakin besar realisasi dibandingkan target berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna target penurunan, artinya: jika semakin besar realisasi dibandingkan target berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun untuk skala penilaian kinerja pemerintah didasarkan pada skala penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Formulir E.15 serta digunakan indikator warna sesuai kriteria sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Indikator Warna
1	$\geq 91$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional di Kota Mataram.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

**Tabel 2.11**
**Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Mataram**

No	Indikator Kinerja Makro	Realisasi 2020	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,91	79,29	79,14	99,81%
2	Pertumbuhan Ekonomi	- 5,5	- 0,95	3,51*	469%
3	Angka Kemiskinan	8,47	9,00	8,65	96,11%
4	Indeks Gini	0,381	0,374	0,421*	87,43%
5	Inflasi	0,58	3	2,07*	100%

Capaian kinerja pembangunan di tahun 2021 menunjukkan hasil yang memuaskan dari yang telah ditargetkan. Beberapa indikator kinerja mencapai kondisi yang menunjukkan perbaikan di tengah kondisi pandemi yang terjadi selama tahun 2020 dan 2021. Terlihat bahwa terjadi perbaikan kondisi perekonomian Kota Mataram yang ketika tahun 2020 sempat berkontraksi ke minus 5,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi tumbuh 0,96 persen, dimana jika membandingkan target yang ditetapkan di perencanaan yaitu menjaga agar tidak terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi melebihi minus 0,95 persen. Kondisi ekonomi yang tumbuh ini didukung oleh laju inflasi yang terjaga di 3 persen, pertumbuhan sektor ekonomi unggulan 1,55 persen dibandingkan dengan target minus 0,60 persen, serta pertumbuhan Sektor Ekonomi Kreatif meningkat menjadi 9,95 persen di tahun 2021. Efeknya adalah angka kemiskinan yang diproyeksikan naik menjadi 9 persen di Tahun 2021 pada kenyataannya dapat ditekan menjadi 8,65 persen, walaupun masih terjadi penambahan persentase kemiskinan dibandingkan dengan tahun 2020.

Keseluruhan target dan capaian yang diukur mengacu pada RPJMD yang dimana setiap indikator telah berusaha disusun menggunakan pendekatan cascade down sebagai parameter keberhasilan berjenjang pada tiap perangkat daerah yang mampu merefleksikan prioritas pembangunan Kota Mataram dengan visi Kota Mataram yang Harmoni, Aman, Ramah, Unggul dan Harmoni. Pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Mataram dilakukan terhadap pencapaian indikator sasaran strategis yang disasar oleh program-program yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026. Berikut merupakan data realisasi yang telah dicapai selama penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran 2021 :

Tabel 2.12

## Progres Dan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2021

MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	TARGE T 2021	REALIS ASI 2021	% CAPAIAN
<b>MISI I : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER</b>						
I.1 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	Nilai	78,91	79,29	79,14	99,81%
I.1.1 Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Meningkat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,46	9,51	9,54	100,32%
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,28	15,36	15,64	101,82%
I.1.2 Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,43	71,76	71,88	100,17%
	Prevalensi Stunting	persen	20,7	18,81	22,7	82,1%
1.1.3.Keberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkat	Angka Kemiskinan	persen	8,47	9,00	8,65	96,11%
	Indeks Pembangunan Gender	nilai	92,77	92,80	92,8*	100%
	Indeks Pembangunan Kepemudaan	nilai	64,46	64,75	64,75	100%
<b>MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN</b>						
II.1 MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	persen	57,05	57,21	54,05	94,48%
II.1.1 Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	57,05	57,21	54,05	94,48%
II.2 MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	INDEKS INFRASTRUKTUR WILAYAH	persen	59,24	60,24	60,24	100%
II.1.2 Kualitas Infrastruktur Perkotaan Meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	persen	59,24	60,24	60,24	100%

MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	TARGE T 2021	REALIS ASI 2021	% CAPAIAN
<b>MISI III : MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING</b>						
III.1 MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	persen	-5,5	-0,95	3,51*	469%
	GINI RATIO	Nilai	0,381	0,374	0,421*	87,43%
	INFLASI	persen	0,58	3 ± 1	2,07*	100%
III.1.1 Kinerja Sektor Ekonomi Unggulan Meningkat	Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	persen	-4,85	-0,60	1,55*	358%
III.1.2. Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif Meningkat	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi kreatif	persen	9,85	9,90	9,95*	99,9%
<b>MISI IV : MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH</b>						
IV.1 MENGENDALIKAN KONDUSIFITAS WILAYAH	INDEKS KEAMANAN MANUSIA	Nilai	3,70	3,70	3,7*	100%
IV.1.1 Stabilitas Wilayah Terkendali	Indeks Keamanan Manusia	Nilai	3,70	3,70	3,7*	100%
<b>MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK</b>						
V.1 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN INOVATIF	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Nilai	64,00	64,50	64,5*	100%
V.1.1 Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kota Mataram Meningkat	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	65,76	66,00	66,0*	100%
	Indeks SPBE	Nilai	n/a	3,56	2,34	78%
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	predikat	n/a	B	n/a	n/a
	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP*	100%
IV.1.2 Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Kepuasan Pelayanan	persen	n/a	n/a	0,70	100%
	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	1.944*	60	53.17	n/a

Berdasarkan pengukuran diatas maka dapat dilihat bahwa 6 tujuan dan dari 10 sasaran yang tercantum pada RPJMD 2021-2024, 21 diantaranya berkategori sangat tinggi, 3 berkategori tinggi dan 2 lainnya belum dapat diklasifikasikan dikarenakan data valid terkait indicator dimaksud belum dirilis pada awal tahun 2022.

#### D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

##### ***Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter***

Kualitas pembangunan manusia di suatu daerah sejatinya menjadi aspek penting dalam merealisasikan agenda pembangunan. Demikian halnya yang terjadi di Kota Mataram, kualitas dan karakter sumber daya manusia selalu menjadi orientasi dan prioritas pembangunan guna mewujudkan pembangunan yang komperhensif di segala sektor. Komitmen ini tercermin pada misi pertama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan membentuk karakter sumber daya manusia yang handal. Misi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan rakyat dengan diindikatori oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram merilis data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada pada kondisi **Tinggi** dengan skor 79,14. Skor ini memang tidak melampaui target yang telah ditetapkan, namun kondisi IPM di Kota Mataram menunjukkan peningkatan yang berkesinambungan setiap tahunnya. Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan memperhatikan peran penyuluh agama dalam membangun ahlak masyarakat. Komitmen tersebut mendapat apresiasi melalui Penghargaan kepada Walikota Mataram sebagai Kepala Daerah yang telah berpartisipasi mendukung program moderasi beragama dan penguatan fungsi penyuluh agama oleh kementerian Agama RI, 30 November 2021.

**Tabel 2.13**

##### **Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	%
i 1 s	Indeks Pembangunan Manusia	78,91	79,29	79,14	99,81

ini memiliki tiga sasaran utama yakni peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan derajat Kesehatan masyarakat, dan peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Pada sasaran pertama, kualitas penyelenggaraan pendidikan ditingkatkan dengan fokus pada peningkatan tata Kelola dan infrastruktur Pendidikan melalui pemantapan kebijakan pada sektor Pendidikan. Komitmen peningkatan kualitas Pendidikan ini membuahkan hasil yang signifikan yang tercermin pada realisasi indikator kinerja pada sasaran ini.

Pada dimensi Pendidikan, rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) berada pada kondisi realisasi melebihi 100% atau telah melampaui target yang ditetapkan. Begitu juga Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram yang berada pada usia 71,88 tahun pada 2021 merupakan suatu capaian yang telah melampaui targetnya yang berada pada angka 71,76. Secara persentase, capaian pada indikator kinerja di sektor Pendidikan berada pada kondisi melebihi target atau lebih dari 100%.

Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari Dinas Pendidikan yang membidangi sasaran pertama ini melalui Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, serta Program Pengendalian Perizinan Pendidikan yang ditunjang pula dengan program dalam urusan kebudayaan dalam meningkatkan karakter SDM Kota Mataram yaitu Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, serta Program Pengelolaan Permuseuman.

**Tabel 2.14**

**Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Misi Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	%
1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	9,46	9,51	9,54	103,3
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,28	15,36	15,64	101,8
3	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,43	71,76	71,88	100,1
4	Prevalensi Stunting	20,7	18,81	22,7	82,1

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Realisasi	%
		2020	2021	2021	
5	Angka Kemiskinan	8,47	9,00	8,65	96,11
6	Indeks Pembangunan Gender	92,77	92,80	92,80*	100*
7	Indeks Pembangunan Kepemudaan	64,46	64,75	64,75	100

Perkembangan yang kian positif juga ditunjukkan dari misi ke dua yakni pada peningkatan derajat Kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup juga meningkat dari 70,43 tahun menjadi 71,88 tahun dengan persentase 100,1%.

Terkait data stunting Kota Mataram pada tahun 2021, besar prevalensi stunting di Kota Mataram yakni 22,78% atau 3.366 balita dari 14.773 balita yang diukur Panjang badan/tinggi badan. Angka tersebut bersifat dinamis dikarenakan variable perhitungan didasari kemampuan pelaksanaan pengukuran balita. Pada tahun 2021, total balita di Kota Mataram umur 0 - 59 bulan yakni 31.175 balita, namun dikarenakan refocusing anggaran dan pandemic Covid 19 yang sangat berdampak pada pelaksanaan pengukuran, total balita umur 0-59 bulan yang dapat diukur di Kota Mataram berada pada kisaran 14.773 balita. Kedepannya, peningkatan jumlah balita yang diukur dapat merepresentasikan penurunan pada prevalensi stunting dan data yang lebih komperhensif.

Keberhasilan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat ditunjang oleh upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat Kota Mataram diantaranya adalah keberhasilan Kota Mataram mendapat penghargaan yaitu:

1. Sebagai Kabupaten/Kota STOP BABS (SBS) dalam upaya memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam penyediaan layanan sanitasi berbasis masyarakat tahun 2021; serta
2. Juara 2 Lomba Kampung Sehat jilid II oleh Polda NTB 30 November 2021 di Prime Park Hotel.

Pada sasaran ketiga yakni peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, indeks pembangunan gender dan indeks pembangunan kepemudaan diprediksi tetap meningkat dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Indeks

pembangunan gender berada diprediksi tetap mengalami peningkatan dan berada pada kisaran 92,80 yang mencerminkan kesetaraan dan rendahnya diskriminasi antar gender di Kota Mataram. Lebih lanjut, membangun kesetaraan dan keadilan gender adalah hal yang diupayakan secara konsisten oleh pemerintah Kota Mataram melalui beberapa kebijakan-kebijakan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin berbagai program pembangunan.

Partisipasi perempuan dalam program tersebut, terutama ditujukan dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi dan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

Implementasi program pembangunan tersebut antara lain peningkatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran di masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya. Namun demikian, berbagai tantangan harus dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu upaya tersebut belum memperlihatkan hasil yang maksimal, meskipun sudah menunjukkan peningkatan yang berarti dalam pembangunan berbasis gender.

#### Perkembangan IPG Kota Mataram Tahun 2017- 2020



Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pencapaian pembangunan gender di Kota Mataram menunjukkan peningkatan setiap tahunnya (Gambar ....) IPG Kota Mataram dalam kurun waktu tahun 2017-2020 telah meningkat dari 92,66 pada tahun 2017

menjadi 92,77 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menjadi 92,79 Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak. Untuk tahun 2021, penilaian IPG diikhtikarkan untuk dapat meningkat ke poin 92,80 namun data ini akan dirilis pada pertengahan tahun 2022.

Peningkatan IPG setiap tahunnya menunjukkan bahwa program-program pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender, sudah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan di Kota Mataram. Hal ini terlihat dari pencapaian IPG pada kurun waktu tersebut telah mampu mengurangi jarak (gap) secara nyata dalam pencapaian kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, perlu dilakukan upaya yang maksimal sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terwujud secara nyata.

Capaian tersebut sangat tergantung dari sumber daya manusia, keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat, serta pengaruh sosial kultural yang menyertai kehidupan bermasyarakat di suatu wilayah. Jumlah penduduk perempuan yang besar merupakan potensi sumber daya manusia yang nyata dalam mewujudkan kemakmuran suatu wilayah. Kaum perempuan tidak hanya berpotensi mendidik generasi muda yang berkualitas, namun juga ikut serta berpartisipasi dalam membangun suatu wilayah. Dengan demikian, perempuan yang berkualitas secara nyata akan meningkatkan kemakmuran disuatu wilayah. Sehubungan hal tersebut, perlu adanya pembahasan mengenai capaian pembangunan manusia yang sudah mengakomodasi kesetaraan gender. Pembahasan tersebut merupakan informasi yang sangat berguna khususnya bagi pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk perempuan sehingga tercapai kesetaraan dan keadilan gender disuatu wilayah.

Meskipun demikian, dimensi ekonomi masih belum dapat menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditandai dengan menurunnya prevalensi angka kemiskinan dari 8,47% menjadi 8,65%. Kondisi ini merupakan dampak dari kondisi Pandemi Covid 19 di Kota Mataram yang memperlambat perekonomian dan kemudian memberi dampak sosial yang relatif luas. Meskipun demikian, penyesuaian postur APBD berupa refocusing anggaran dan penyaluran bantuan dan stimulant dari Pemerintah Pusat telah berhasil didistribusikan sehingga dapat mereduksi dampak yang ditimbulkan oleh pandemic tentunya pada aspek sosial dan perekonomian.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Mataram berhasil mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 13 Oktober 2021. Anugerah ini diberikan Pemerintah Pusat sebagai pengakuan atas komitmen, upaya dan prestasi kementerian, lembaga serta pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender.

***Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Perkotaan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan***

**Tabel 2.15**

**Capaian Indikator Kinerja IKLH & IIW Kota Mataram**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target	Realisasi 2021	%
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,05	57,21	54,05	94%
2	Indeks Infrastruktur Wilayah	59,24	60,24	60,24*	100%

Misi kedua pada RPJMD 2021-2026 berorientasi pada aspek lingkungan hidup dan pembangunan yang adil dan berkeadilan. Selaras dengan seluruh tujuan negara-negara di Dunia untuk mengurangi karbon emisi yang berdampak pada pemanasan global, Pemerintah Kota Mataram berkomitmen mendukung perbaikan kualitas udara, air dan penggunaan lahan dengan mengedepankan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pelaksanaan tujuan dan sasaran pertama yang berkaitan dengan lingkungan hidup ditandai dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sementara untuk aspek pembangunan infrastruktur perkotaan diindikatori dengan Indeks Infrastruktur Wilayah.

Pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pada tahun 2021 berada pada angka 54,05 dengan performa dimasing-masing komponen sebagai berikut :

**Tabel 2.16**  
**Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks	Target 2021	Realisasi 2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,23	54,05
Indeks Kualitas Air (IKA)	43,73	39,82
Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,42	84,39
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	28,63	22,38

Capaian IKLH Kota Mataram berada pada kriteria Tinggi meskipun belum mencapai 100% target. Hal tersebut di akibatkan oleh beberapa hal, diantaranya:

Indeks Kualitas Air (IKA) beberapa parameter melebihi baku mutu :

- Hasil uji BOD di beberapa titik dan waktu pemantaun mengalami kenaikan sehingga menyebabkan nilai BOD melebihi Baku Mutu;
- Hasil Uji DO (Dissolved Oxygen) di beberapa titik dan waktu pemantauan mengalami penurunan sehingga nilai DO tidak memenuhi baku mutu;
- Hasil Uji Fosfat di beberapa titik dan waktu pemantaun mengalami kenaikan sehingga menyebabkan nilainya melebihi Baku Mutu;
- Hasil Uji Ecoli dan total coliform di semua titik pemantauan masih sangat tinggi dan melebihi baku mutu.

PARAMETER	SATUAN	Bakumutu Air Kelas II	HASIL UJI KUALITAS AIR SUNCAI JANGKOK TAHUN 2021											
			Pantau I			Pantau II			Pantau III			Pantau IV		
			(Januari 2021)			(Juni 2021)			(September 2021)			(November 2021)		
			Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
BOD	mg/L	3	3,27	2,19	2,1	1,99	3,72		2	2	2	2	2	2,39
DO	mg/L	4	4,99	4,65	3,21	5,04	4,56	2,05	5,01	4,73	2,00	5,43	5,02	4,68
Fosfat sebagai P	mg/L	0,2	0,05	0,08	0,11	0,09	0,13	0,21	0,1	0,14	0,2	0,05	0,6	0,08
E.Coliform	MPN/100ml	1000	35.000	54.000	>160.000	25.000	>160.000	>160.000	35.000	220.000	92.000	4.300	4.300	
Total Coliform	MPN/100ml	5000	54.000	920.000	>160.000	>160.000	>160.000	>160.000	>160.000	160.000	>160.000	>160.000	160.000	

Indeks Kualitas Lahan juga mengalami tingkat capaian yang rendah dikarenakan terjadinya pengurangan luas tutupan lahan di Kota Mataram.

Meskipun IKLH belum mencapai pemenuhan target secara penuh, namun ada beberapa program kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Mataram diantaranya;

- a. Pencarian target pencemaran air
- b. Pengawasan Usaha atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran
- c. Melakukan pemetaan luas RTH yang eksisting dan RTH Perencanaan
  - Penurunan IKLH: alasan, penanggulangan
  - Kondisi IW

### **Misi 3 : Meningkatkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target	Realisasi 2021
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-5,5	-0,95	0,96*
2	Gini Ratio	0,381	0,374	0,365*
3	Inflasi	3±1	0,58	3±1*

Misi ke tiga pada visi menciptakan Mataram yang HARUM menitikberatkan pada peningkatan ekonomi daerah. Kota Mataram sebagai pusat peradaban di Nusa Tenggara Barat memiliki kapabilitas yang tidak diragukan dalam memanfaatkan potensi-potensi daerah untuk membangun perekonomian baik pada sektor makro ataupun mikro. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram yang sementara ini tercatat telah keluar dari zona depresi dan diprediksi tumbuh pada zona positif. Begitu juga pada aspek distribusi pemerataan perekonomian di Kota Mataram yang memperlihatkan kondisi yang kian positif dengan menurunnya gini ratio dari 0,381 pada 2020 ke 0,365 pada 2021. Angka ini relative lebih rendah dibandingkan gini ratio nasional yang berada pada 0,384 pada 2021<sup>1</sup>. Sementara itu untuk inflasi, Kota Mataram masih terus berikhtiar untuk menjaga kondisi inflasi pada pertumbuhan yang positif yakni pada kisaran 1%-3% dalam 1 tahun.

<sup>1</sup> [Data BPS 2021](#)

\*[Data sementara, prediksi RPJMD 2022-2024](#)

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target	Realisasi 2021
1	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Unggulan	-4,85	-0,6	1,55*
2	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kreatif	9,85	9,9	9,95*

Pada aspek ekonomi mikro, laju pertumbuhan sektor ekonomi unggulan diikhtiarkan untuk mampu tumbuh keluar dari *zona negative* sehingga mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 telah mampu memenuhi target-target objektifnya terutama dalam pembangunan sektor ekonomi yang menjadi prioritas Kota Mataram. Lebih lanjut, pada aspek ekonomi kreatif, pertumbuhan diprediksi dapat mencapai angka 0,1% pada tahun 2021 dengan pertimbangan dampak pandemi yang memberi dampak massif pada aspek permodalan.

Tantang terbesar dari pertumbuhan ekonomi adalah management resiko antara penanganan pandemic Covid-19 terutama pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat tetapi dengan memperhatikan eksese dari penanganan tersebut terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Strateginya adalah tidak membatasi penuh tetapi memelenggarakan pembatasan aktifitas, dengan didukung oleh upaya mencapai target vaksinasi dalam rangka membangun kekebalan komunal (*heard imunity*) terhadap virus Covid-19. capaian dosis 1 di kota ini telah mencapai 106,36 persen dan dosis 2 di angka 79,59 persen. Di wilayah ini, total peserta yang sudah divaksin tercatat 615,11 ribu dosis dari target 315,58 ribu peserta vaksin bahkan perkembangan terkini tingkat vaksinasi dosis 3 di Nusa Tenggara Barat tertinggi adalah di kota Mataram yang kini telah mencapai 8,96 persen data per Rabu, 16 Februari 2022.

Selain itu, dengan mempertimbangkan dampak penurunan PDRB terbesar akibat pandemi adalah pada sektor pangan kerja akomodasi, hotel dan restoran, maka berbagai upaya dilakukan agar kepercayaan masyarakat akan protokol kesehatan yang diterapkan di hotel dan restoran telah sesuai standar. Dinas Pariwisata sebagai leading sektor Pariwisata di Kota Mataram berupaya terus mengedukasi pelaku Pariwisata akan pentingnya menjaga protocol Kesehatan selama pandemi agar sektor ini tidak semakin terpuruk bahkan bisa berpotensi meningkat dengan adanya kegiatan Nasional di Lombok yaitu WSBK di akhir tahun 2021. Dengan semangat

tersebut, serta dengan memanfaatkan dana Hibah Pariwisata pemerintah terus mendorong pelaku wisata di Kota Mataram untuk mendapatkan sertifikat CHSE. CHSE adalah program Kemenparekraf yang berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan). Dengan branding ini, diharapkan akan dapat menarik wisatawan baik domestik, nasional serta mancanegara dengan mengembalikan kepercayaan publik tentang keamanan selama menginap dan wisata kuliner di Kota Mataram.

#### **Misi 4 : Meningkatkan Keamanan Wilayah**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target	Realisasi 2021
1	Indeks Keamanan Manusia	37	37	37*

Misi ke 4 merupakan perwujudan dari komitmen untuk menciptakan suatu konsep kelayakan dari segi keamanan dan kenyamanan bagi seluruh penduduk Kota Mataram. Misi ini diindikatori oleh Indeks Keamanan Manusia yang memperhatikan empat variable utama yakni Keamanan dari bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan keberagaman dan keamanan dari kekerasan. Indeks ini juga difungsikan sebagai *early warning system* pada proses perencanaan dan pembangunan di Kota Mataram sehingga Pemerintah Kota Mataram dapat bekerja secara lebih tanggap. Kondisi keamanan manusia di Kota Mataram berada pada kondisi cukup aman dengan nilai indeks keamanan manusia 37.

Dalam mencapai tujuan keamanan wilayah dimana kinerja ini bukan merupakan kewenangan yang diberikan oleh Pusat kepada daerah, fungsi koordinasi dengan berbagai instansi baik vertikal maupun horizontal merupakan upaya yang dilakukan. Sinergitas antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana serta Pemadam Kebakaran dengan Institusi Polisi dan TNI berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan Misi ini. Dalam upaya menjaga kondusifitas wilayah Kota Mataram, kinerja tersebut diapresiasi dengan penghargaan Walikota Mataram sebagai Kepala Daerah Terbaik III dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pokok TNI pada peringatan HUT TNI tanggal 5 Oktober 2021.

### ***Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Partisipasi Publik***

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target	Realisasi 2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	64	64,5	64.75*

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mataram juga menjadi atensi utama visi mewujudkan Kota Mataram yang HARUM terutama pada misi ke 5. Pada misi ke 5 ini, orientasi utama misi ini ada pada penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi publik. Misi ini memiliki indikator tujuan yang mengacu pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang didalamnya memiliki aspek penilaian yang luas sehingga mampu merefleksikan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan berorientasi pada partisipasi masyarakat. Pada pelaksanaan reformasi birokrasi, Kota Mataram berupaya untuk dapat meningkatkan nilai capaian pelaksanaan RB dari 64 pada 2020 menjadi 64,5 di 2021. Nilai yang kerap di rilis bersamaan dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada akhir tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi, belum dapat dipublikasi pada 2021 dan mungkin akan segera dirilis pada tahun 2022.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Nilai Evaluasi Sakip	66,0	65,76	66.0*
2	Indeks SPBE	3,0	2,51	2.34
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	n/a	n/a	
4	Opini BPK	WTP	WTP	
5	Indeks Kepuasan Pelayanan	0,70	n/a	0,70
6	Indeks Inovasi Daerah	2.500	1.944	53.17

Adapun yang kerap menjadi sorotan dalam penyelenggaraan pemerintahan di era 4.0 ini yakni Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Di Kota Mataram, nilai SPBE telah mencapai kategori cukup dengan nilai 2.34 pada tahun 2021. Nilai menurun dari tahun 2020 dikarenakan adanya pemutakhiran mekanisme penilaian yang menambahkan manajemen SPBE sebagai salah satu domain yang baru. Kendati demikian, Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE pada tahun berikutnya dengan beberapa program dan kegiatan dengan fokus untuk membangun data centre, mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di Pemerintah Kota Mataram dan tentunya mendorong ASN untuk menghabituisasikan penggunaan fasilitas-fasilitas teknologi yang telah dibentuk.

Lebih lanjut, penyelenggaraan pemerintahan berkualitas tidak hanya dicerminkan oleh SPBE namun juga tingkat inovasi suatu daerah. Pada tahun 2021, Kota Mataram menerima predikat sebagai Kota yang **Inovatif** dengan skor inovasi daerah berada pada nilai 53.17. Nilai ini berbeda dengan target dan tahun sebelumnya dikarenakan pemutakhiran dan penyesuaian system penilaian inovasi. Kedepannya, Pemerintah Kota Mataram tetap berusaha untuk menjadi Kota dengan kriteria **Sangat Inovatif** dengan memenuhi segala kriteria inovasi yang telah ditentukan. Untuk mendukung pelaksanaan Kota Mataram sebagai Kota yang Sangat Inovatif maka telah diterbitkan komitmen "*One Agent, One Innovation*" untuk mengakselerasi kemampuan berinovasi di masing-masing perangkat daerah.

Lebih lanjut, untuk mengoptimalkan inovasi daerah Badan Penelitian dan Pembangunan juga memiliki beberapa program/rencana aksi yang telah dilakukan untuk penilaian indeks inovasi daerah :

1. Mengadakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) inovasi daerah yang mengundang masyarakat, PNS, dan lainnya yang memiliki potensi inovasi daerah untuk diberi pemahaman dan bimbingan pengembangan inovasinya;
2. Hasil Bimtek nantinya peserta (inovator) akan dikelompokkan ke dalam 2 cluster. Pertama inovator yang telah memiliki dan menerapkan inovasi. Kluster kedua adalah peserta yang memiliki rancangan namun belum menjadi sebuah inovasi;
3. Menyelenggarakan Lomba Inovasi Daerah tingkat Kota Mataram dengan melibatkan peserta Bimtek dengan kluster inovator yang telah memiliki dan menerapkan inovasi;

4. Seluruh inovasi daerah Kota Mataram dari hasil Lomba Inovasi Daerah walaupun bukan pemenang selanjutnya akan disempurnakan dan diberi bimbingan teknis pengisian indeks inovasi daerah (sesuai Petunjuk teknis Kemendagri) lalu dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diberi nilai Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang dikirimkan sebelumnya.

Beberapa upaya Pemerintah Kota Mataram dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta peningkatan pelayanan kepada publik, mendapatkan apresiasi yang baik dalam bentuk penghargaan sebagai tanda bahwa pemerintah Kota Mataram telah sungguh-sungguh dalam berupaya memberikan yang terbaik. Adapun beberapa penghargaan terkait upaya pencapaian Misi ke-5 yaitu :

1. Penghargaan Pemerintah R.I kepada Pemerintah Kota Mataram Atas Capaian Opini WTP 7x berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 s.d 2021 tanggal 11 Oktober 2021 di Hotel Aruna Senggigi;
2. Penghargaan terbaik dalam ajang Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2020, Capaian Sementara MCP Tahun 2021 pada acara puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 di Gedung KPK Jakarta, 9 Desember 2021;
3. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Badan Publik Informatif Kategori Kabupaten/ Kota dari Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat tanggal 9 Desember 2021;
4. Penghargaan Kota Mataram sebagai Smart City Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Penghargaan Smart City Kategori Smart Living (penerapan e-Reservasi RSUD Kota Mataram) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diserahkan Menteri Kominfo di Jakarta, 14 Desember 2021;
5. Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 di angka 85,97 (kepatuhan tinggi, zona hijau) dari Ombudsman RI, 9 Februari 2022;
6. Pemenang Kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran pada Anugerah Penyiaran KPID NTB 2022, 17 Februari 2022.

## BAB III

### PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2021 menggambarkan realisasi kinerja Pemerintah Kota Mataram tahunan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil analisis dari realisasi capaian kinerja pemerintah kota Mataram tahun 2021 dalam menjawab 6 tujuan dan 18 indikator dalam menjawab 10 sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026, 21 diantaranya berkategori sangat tinggi, 3 berkategori tinggi dan 2 yang lainnya belum dapat diklasifikasikan. Hasil capaian kinerja Pemerintah Kota Mataram secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mataram Tahun 2021 telah berhasil memenuhi target dan menunjukkan hasil yang memuaskan dari yang telah ditargetkan.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta menerapkan konsep budaya kinerja yang holistic, maka Pemerintah Kota Mataram melaksanakan Langkah-langkah kongkret sebagaimana rekomendasi dalam Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 7 Maret Tahun 2020 Nomor: B/374/AA.05/2022 Hal : Hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan pada dokumen komitmen Kepala Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah hingga Pejabat pada level pelaksana sebagai dasar penjenjangan kinerja dalam mewujudkan system kerja yang koheren dan berkelanjutan;
2. Menyusun *cascading* dengan pendekatan kerangka berfikir logis dengan tetap mengacu pada tinjauan normative yang berkaitan dengan pengelompokan dan pengklasifikasian program dan kegiatan pada urusan-urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pintar dalam pengelolaan kinerja pegawai untuk meningkatkan akurasi dan detail kinerja sehingga proses evaluasi kinerja dapat dilaksanakan secara objektif;
4. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas internal, agar hasil evaluasi yang dilakukan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan penerapan SAKIP yang lebih efektif. Perlu dilakukan pula pemantauan terhadap tindak lanjut saran atau rekomendasi guna mengetahui sejauh mana hasil evaluasi ditindak lanjuti untuk perbaikan;
5. Melakukan evaluasi pada program kerja melalui pemetaan crosscutting untuk menguatkan hubungan kolaborasi antar perangkat daerah dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk pembangunan daerah;

6. Mengoptimalkan peran teknologi dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga konsep transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dapat terealisasi dalam Pemerintah Kota Mataram;
7. Menyusun peta risiko pada masing-masing Perangkat Daerah untuk menguatkan aspek manajerial pada Perangkat Daerah sebagai entitas organisasi dan membentuk organisasi pemerintah yang *resilient* dan *agile*.

Lebih lanjut, terdapat beberapa rencana perbaikan yang akan dilakukan dengan berorientasi pada perubahan yang incremental pada penyelenggaraan kinerja Pemerintah Kota Mataram. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kota Mataram di 2022. Penambahan kapasitas ruang simpan dan teknologi serupa yang mendukung terciptanya administrasi pemerintahan dengan implementasi lebih mudah melalui aplikasi merupakan salah satu bentuk kongkret. Selanjutnya, penyusunan peta proses bisnis pada level Pemerintah Kota Mataram sebagai awal dari harmonisasi dan pengarusutamaan kinerja perangkat daerah. Hal ini dirasa menjadi hal yang krusial dikarenakan penyelenggaraan program kerja perangkat daerah tidak jarang tumpang tindih.

Adapun rencana penyelenggaraan Coaching Clinic Kembali untuk mengevaluasi progress pembenahan Cascading Perangkat Daerah yang digunakan sebagai alat refleksi Renja Perangkat Daerah dan kesesuaian RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026. Komitmen dari Kepala Daerah dan seluruh Kepala Perangkat Daerah kedepannya akan diteguhkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung akuntabilitas tidak hanya dipandang sebagai *Business as Usual* melainkan hal prioritas yang harus dihabituasikan.

Singkatnya, Pemerintah Kota Mataram tetap konsisten dalam memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan dengan tetap mengacu pada konsep *Good Governance* dan *Participative Government* sehingga cita dan asa untuk membangun Kota Mataram menjadi Harmoni, Aman, Ramah, Unggul dan Mandiri sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Mataram 2021-2026 dapat terwujud secara menyeluruh dan tentunya menebar manfaat seluas mungkin bagi khalayak public.